

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

1. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia legi* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).¹ Pertimbangan hukum harus dimulai dengan kata “menimbang.... dan seterusnya” sesuai dengan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus dilakukan apabila kesalahan terdakwa terbukti didepan sidang pengadilan dan tentu kesalahan terdakwa sesuai yang termaktub dalam dakwaan penuntut umum. Menyatakan seorang terdakwa bersalah membutuhkan alat bukti minimum yang sah dan dapat meyakinkan hakim akan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Setelah itu maka terdakwa dapat dijatuhkan pidana. Hal ini sesuai dengan rumusan pasal 183 KUHAP yang menegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sesuai hal

¹ Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993 halaman. 23

itu, dalam undang-undang mengkendaki adanya dua alat bukti yaitu dua alat bukti minimum yang menyakinkan hakim untuk dapat menjatuhkan menjatuhkan putusan bersalah terhadap terdakwa. Pasal 184 ayat 1 KUHAP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Di dalam pelaksanaannya, hakim maupun jaksa mengemukakan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam tuntutan dan penjatuhan pidana yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Faktor yang meringankan antara lain adalah terdakwa masih muda, mengakui perbuatannya dan berperilaku sopan. Faktor-faktor yang memberatkan adalah terdakwa tidak mengakui perbuatannya, mengganggu atau meresahkan masyarakat, merugikan negara dan sebagainya.

1. Hal Yang Meringankan Hal yang meringankan hukuman menurut KUH Pidana adalah sebagai berikut :

- a. Dalam hal umur yang masih muda *incapacity or infacy*, berdasarkan pasal 47 ayat (1) KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Jika Hakim menghukum anak yang bersalah itu, maka maksimum hukuman pokok bagi tindak pidana itu, dikurangi sepertiga.”
- b. Dalam hal percobaan melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut. “Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan.”

c. Dalam hal membantu melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut. “Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu, dikurangi sepertiga bagi pembantu.”

2. Hal Yang Memberatkan Hal yang meringankan hukuman menurut KUH Pidana adalah sebagai berikut :

a. Dalam hal Concursus, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 KUH Pidana :

1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri. sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana-pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya.²

Dan Pasal 66 KUH Pidana yang berbunyi :

1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

² Lihat Pasal 65 KUHP

2) Dalam hal ini pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.”

b. Dalam hal *Recidive* Berdasarkan Pasal 486, 487, dan 488 KUH Pidana.

2. Hakim

Sesuai dengan ketentuan umum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.³

Berhakim berarti minta diadili perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, Hakim di dalam menjalankan tugas wajib menjaga kemandirian peradilan, tidak boleh ada campur tangan dari pihak luar.

Ditinjau secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang komisi Yudisial yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan disemua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung serta

³ Lihat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

hakim Mahkamah Konsitusi sebagaimana dimaksud didalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian hakim adalah sebagai pejabat Negara yang diangkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya menurut undang-undang yang berlaku. Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Bahkan ia “identik” dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim.

Oleh karena itu, pencapaian penegakkan hukum dan keadilan terletak pada kemampuandan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.

3. Hakim Anak

Hakim anak diangkat berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Berdasarkan Pasal 43 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak. Hakim anak harus mempunyai kualifikasi :

- a) telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum,
- b) mempunyai minat, perhatian, dedikasi,, dan memahami masalah anak,

c) telah mengikuti pelatihan teknik tentang peradilan anak.⁴

Seorang hakim anak memiliki kewenangan dan tugas yang telah diatur juga dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu;

a. Hakim memeriksa dan memutus perkara Anak dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal;

b. Ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan terhadap anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya;

c. Dalam setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti.⁵

Berkaitan dengan pasal tersebut perlu dibuat peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang syarat-syarat menjadi hakim anak. Seperti pengalaman menjadi hakim perlu dijabarkan pengalaman dalam hal menangani perkara anak. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa hakim anak merupakan hakim khusus yang memiliki keahlian khusus dalam menangani perkara anak, Hakim anak disamping berpendidikan sarjana hukum, ditambah dengan pengetahuan tentang psikologi, psikiatri, sosiologi, mencintai anak, dapat menyelami jiwa anak, berkarakter ingin ikut membina dan membantu terutama anak dalam kesulitan.

⁴ Pasal 43 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak.

⁵ Pasal 44 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak.

Hakim anak diharapkan mampu memprediksi dan menganalisis segala hal yang berkaitan dengan anak, serta mampu mengambil tindakan yang akurat dalam perkara anak.

3. PUTUSAN HAKIM

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.⁶

Dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 11 KUHAP, yang dimaksud dengan putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Mahkamah Agung telah menentukan pilihan agar hakim dalam membuat putusan berpedoman 3 hal :

- a. Unsur yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama.

⁶ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. Halaman 74

- b. Unsur filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan.
- c. Unsur sosiologis, yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika hal-hal negatif tersebut dapat dihindari, tentu saja diharapkan dalam diri hakim hendak lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan moral jika kemudian putusan yang dibuatnya itu dapat menjadi tolok ukur untuk perkara yang sama, atau dapat menjadi bahan referensi bagi kalangan teoritis maupun praktisi hukum serta kepuasan nurani tersendiri jika putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan pengadilan yang lebih tinggi.⁷

Hakim adalah manusia biasa, banyak faktor yang dapat mempengaruhi hakim dalam membuat putusan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hakim dalam membuat putusan terdiri dari :

a. Faktor Internal;

- 1) Iman dan kepercayaan.
- 2) Pengalaman.
- 3) Pengetahuan.

⁷ Lilik Mulyadi, *Penerapan Putusan Hakim pada Kekerasan dalam Rumah Tangga*. 2007. Jakarta, halaman. 25.

4) Kebutuhan dan perilaku hakim.

b. Faktor Eksternal;

1) Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2) Kemauan politik penguasa.

3) Tekanan dari masyarakat.

4) Suap dan keadaan lingkungan.⁸

Putusan hakim yang menerobos batas ancaman pidana minimal dan pidana denda minimal dapat saja diterima dan dianggap sah sepanjang berdasarkan rasa keadilan dan hati nurani, karena hakim bukan hanya penegak hukum juga sebagai penegak keadilan, asalkan tidak ada kepentingan hakim yang memutuskan perkara tersebut. Putusan hakim yang menerobos ketentuan dalam undang-undang yang normatif, atau dalam hal ini di bawah tuntutan jaksa penuntut umum dapat saja diterima atau tidak batal demi hukum asal didasari pada rasa keadilan yang objektif.

B. Tinjauan Umum Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan

1. Pengertian Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan

Sanksi berasal dari bahasa Belanda yaitu *Sanctie* yang artinya ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu undang-undang.⁹

⁸ <http://www.saurasi.com/pedoman-membuat-putusan/diakses> pada tanggal 22 Maret 2019 Pukul 00.26

⁹ J.C.T Simongkir, Rudy T. Erwin dan Aj.T.Prasetyo, 2000:152

Sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang mentaati aturan atau mentaati ketentuan undang-undang.¹⁰

Di Indonesia merupakan negara yang menggunakan dua jenis sanksi pidana sekaligus, yaitu berupa pidana *straf* dan tindakan (*maatregels*). Sanksi pidana lebih mengandung penderitaan, meskipun unsur pendidikan dan pembinaan serta pengawasannya menjadi tujuan utama. Sedangkan tindakan lebih mengarah pada kegiatan perlindungan, pendidikan dan pembinaan terhadap anak. Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan atau dijatuhkan negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Pidana merupakan rasa tidak nyaman (misalnya berupa pembatasan-pembatasan, pemenuhan kewajiban tertentu) yang dijatuhkan oleh negara melalui peradilan pidana karena seseorang atau badan hukum yang dijatuhi pidana tersebut melanggar hukum secara sah dan menyakinkan bersalah. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.¹¹

Sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, halaman. 7.

tujuan yang bersifat sosial.¹² Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.

1. Sanksi Pidana

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dengan menyimak pasal 71 ayat 1 dan ayat 2 diatur pidana pokok dan tambahan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

a. Pidana Pokok

Ada beberapa pidana pokok terhadap anak yaitu :

1) Pidana peringatan

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.¹³

2) Pidana dengan syarat Mengenai pidana dengan syarat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terbagi atas 3 yaitu :

1. Pembinaan di luar lembaga Dalam pembinaan di luar lembaga, seperti pembinaan, mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan, terapi kejiwaan dan lain sebagainya yang bermanfaat untuk mengembangkan kreativitas dan bakat anak.¹⁴

¹²J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. Bina Aksara, Jakarta, 1987, halaman 350.

¹³ Pasal 71 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁴ Pasal 74 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Pelayanan masyarakat

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.¹⁵ dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.¹⁶

3. Pengawasan.

Dalam hal pidana pengawasandapat dijatuhkan kepada Anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.¹⁷ Ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat, ditentukan pula syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak. Jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga) tahun. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan, dan anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

¹⁵ Pasal 76 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁶ Pasal 76 ayat (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁷ Pasal 77 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

3. Pelatihan kerja

Pelatihan kerja dijatuhkan kepada anak, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.¹⁸ dilakukan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

4. Pembinaan dalam lembaga

Penjatuhan pembinaan dalam lembaga dijatuhkan terhadap anak, dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta.¹⁹ dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.²⁰ Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.²¹

5. Penjara

Dalam menjatuhkan pidana penjara ketentuan yang perlu diperhatikan yakni dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, serta

¹⁸ Pasal 78 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁹ Pasal 80 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁰ Pasal 80 ayat (3) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

²¹ Pasal 80 ayat (4) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

membahayakan masyarakat.²² dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.²³ Apabila tindak pidana yang dilakukan anak membahayakan masyarakat, maka berlaku ketentuan maksimum.

Anak berhak mendapatkan pembebasan bersyarat jika anak berkelakuan baik selama pembinaan, Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.²⁴

Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.²⁵

b. Pidana Tambahan

Seperti yang telah disebut bahwa selain pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak dapat juga dijatuhkan pidana berupa :²⁶

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
2. Pemenuhan kewajiban adat.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka dapat dikatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana atau melanggar apa yang ada di dalam hukum pidana, baik itu merupakan keharusan maupun larangan akan dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.

²² Pasal 79 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

²³ Pasal 79 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁴ Pasal 81 ayat (5) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁵ Pasal 81 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁶ Pasal 71 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Pemidanaan bukan semata-mata ditujukan pada bagaimana memperlakukan pelaku pelanggaran, namun berorientasi pula pada pemikiran sejauh mana pemidanaan dapat memberikan perlindungan, baik bagi pelaku maupun korban.

2. Sanksi Tindakan

Disamping sanksi pidana, dikenal pula sanksi tindakan. Tindakan merupakan penjatuhan sanksi tindakan terhadap seseorang yang terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah dengan tujuan memberikan pendidikan dan pembinaan serta tindakan tertentu lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 69 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.” Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 mengatur mengenai “sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang terbukti secara sah bersalah yaitu :

1. Tindakan yang dikenakan kepada anak meliputi :
 - a. pengembalian kepada orang tua/Wali
 - b. penyerahan kepada seseorang;
 - c. perawatan di rumah sakit jiwa
 - d. perawatan di LPKS;
 - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
 - f. pencabutan surat izin mengemudi
 - g. perbaikan akibat tindak pidana.”²⁷

²⁷ Pasal 82 ayat (1) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.²⁸

Dalam hal penyerahan kepada seseorang yang dimaksud adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta dipercaya oleh Anak dan ini dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan.

Proses Peradilan Pidana Anak Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi Anak untuk dapat diajukan ke sidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan paedagogis bahwa anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dianggap belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik terhadap Anak dilakukan bukan dalam rangka proses peradilan pidana, melainkan digunakan sebagai dasar mengambil keputusan oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional. Dalam ketentuan ini, pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan berupa laporan penelitian kemasyarakatan yang merupakan persyaratan wajib sebelum Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan Sesuai dengan pasal 21 ayat 1, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan terhadap anak yang diduga atau melakukan tindak pidana.

²⁸ Pasal 82 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak

C. Tinjauan Umum Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

1. Pengertian Anak

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig / person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid / inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*).

Anak adalah manusia yang masih kecil sedangkan manusia sendiri merupakan makhluk yang berakal budi.²⁹

Anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan jiwanya, sehingga sangat mudah terpengaruh lingkungannya”.³⁰

Dari kedua pengertian tersebut di atas dapat dikatakan anak adalah makhluk berakal budi yang masih akan berkembang menjadi

²⁹ Kamus Besar bahasa Indonesia, <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi>, diakses 18 Oktober 2017

³⁰ Kartini-Kartono, Gangguan-Gangguan Psikis, Sinar Baru, Bandung, 1981. Halaman 187.

manusia yang utuh. Dalam rangka menuju manusia yang utuh tersebut karena masih muda usia dan jiwanya maka sangat mudah terpengaruh oleh lingkungannya.

Menurut Pasal 330 KUH Perdata

1. Memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu umur 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali :

a. Anak yang sudah kawin sebelum umur 21 (dua puluh satu) tahun.

b. Pendewasaan (pasal 419 KUH Perdata).

2. Menyebutkan bahwa perbuatan perkawinan yang terjadi pada seseorang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, tidak mempunyai pengaruh status kedewasaannya. Jadi, menurut hukum perdata yang dinamakan anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

Menurut Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak mencabut dari kekuasaannya”. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak “Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.” Menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan "Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun".

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak "Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana."

Beberapa pengertian diatas yang telah diuraikan secara terperinci dan dapat disimpulkan bahwa anak yang dikatakan belum dewasa dan yang dapat diajukan kesidang anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam undang-undang ini tidak menyebutkan apa anak tersebut sudah atau belum kawin, sehingga apabila anak terikat dalam suatu perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka anak tersebut dianggap sudah dewasa meskipun umurnya belum 18 (delapan belas) tahun. Dari berbagai hal menurut ilmu pengetahuan atau Undang-Undang memberikan pengertian anak yang berbeda-beda yang menurut masing-masing sesuai apa yang diperlukan dan batasan-batasan yang ada didalamnya masing-masing disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

2. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Menurut Pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

1. “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

2. Anak Nakal adalah :

- a. anak yang melakukan tindak pidana; atau
- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.”

Menurut Pasal 45 KUHP Anak adalah jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum 16 (enam belas) tahun, hakim boleh : memerintahkan, supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya ; walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman ; atau memerintahkan, supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 417-32, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia

melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesudah kejahatan ; atau menghukum anak yang bersalah itu.

Menurut Pasal 153 ayat 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP “Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tidak diperkenankan menghadiri sidang”.

Mengenai batasan usia di atas, telah dirubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010, dari 8 menjadi 12 tahun dan sebelum berusia 18 tahun. Jadi menurut undang-undang ini, bahwa orang yang telah berumur delapan belas tahun keatas pada waktu 18 melakukan tindak pidana maka tuntutan yang diberlakukan sama dengan tuntutan terhadap orang dewasa. Dalam hal ini mereka sudah dianggap dewasa.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu :³¹

- 1) *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidakmenurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah ;
- 2) *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

³¹Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simmons, dalam *Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003, Halaman 2

Namun terlalu ekstrim apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukannya.³²

Dapat dikatakan bahwa memahami kenakalan anak berarti melihat anak dalam perspektif perbuatannya, mengapa kenakalan anak dapat terjadi, mencari sebab-sebabnya baik dari kejiwaan anak, keluarga, masyarakat dimana anak tumbuh, dan lain sebagainya yang membentuk karakter anak yang menyimpang berarti memahami sebab-sebab terjadinya kejahatan anak. Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya kejahatan anak, yaitu:³³

1. Faktor lingkungan
2. Faktor ekonomi/ sosial
3. Faktor psikologis

Terdapat motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang merangsang anak untuk melakukan kejahatan yakni

³²Wagiati Soetodjo, *Op Cit*, Halaman 12.

³³A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1985, Halaman 31

1. Motivasi instrinsik

a. Faktor intelegensia.

b. Faktor usia.

c. Faktor kelamin.

d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.

2. Motivasi ekstrinsik adalah:

a. Faktor rumah tangga.

b. Faktor pendidikan dan sekolah.

c. Faktor pergaulan anak.

d. Faktor mass media.

Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut.

Kenakalan anak disebut juga dengan *Juvenile Delinquency*. *Juvenile* atau yang (dalam bahasa Inggris) dalam bahasa

Indonesia berarti anak-anak; anak muda, sedangkan *Delinquency* artinya terabaikan / mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikuen sidiartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.³⁴

Suatu perbuatan dikatakan delinkuen apabila perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial yang didalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif.³⁵

Dari sisi ilmu jiwa Kenakalan Anak dalam hal ini Ilmu Kesehatan Mental maka kelakuan-kelakuan atau tindakan-tindakan yang mengganggu ketenangan dan kepentingan orang lain yang dianggap sebagai kenakalan atau sebagai perbuatan dosa, oleh ajaran agama dipandang oleh ahli jiwa sebagai manifestasi dari gangguan jiwa atau akibat tekanan batin yang tidak dapat diungkapkan secara wajar. Jadi yang dimaksud dengan kenakalan anak-anak baik yang dipandang sebagai perbuatan yang tidak baik, perbuatan dosa, maupun sebagai manifestasi dari rasa tidak puas, kegelisahan, ialah perbuatan

³⁴A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1985, Hlm.31

³⁵Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Halaman 10.

yang mengganggu ketenangan dan kepentingan orang lain dan kadang-kadang diri sendiri.³⁶

Menurut Pasal 1 angka 8 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyarakatan Anak yang kini istilah lembaga pemasyarakatan anak (lapas anak) sudah tidak dikenal dalam UU SPPA sebagai pengganti UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak). Berdasarkan pasal 1 angka 20 UU SPPA, LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Setiap Lapas Anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Anak didik pemasyarakatan adalah:

- a. Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk di didik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

³⁶ Paulus Hadi Suprpto, Desertasi, yang berjudul Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Non Penal Penanggulangan Perilaku Delinkuensi Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta), 2003. Halaman 113

Manusia Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

2. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.³⁷

Berikut beberapa definisi tentang *strafbaarfeit* menurut para pakar:

Simons mengartikan *strafbaarfeit* sebagai berikut: “*strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya

³⁷ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, 2012 Halaman 20.

tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”³⁸

Moelyatno menyebutkan tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut: “Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”³⁹

Strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtlik*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”⁴⁰

Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatarbelakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

- Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan atas 2 unsur yaitu unsur Subjektif dan unsur Objektif :

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat atau yang ada dalam diri si pelaku, unsur-unsur tersebut diantaranya adalah :

- a. Niat
- b. Maksud atau tujuan
- c. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)
- d. Kemampuan bertanggung jawab Sedangkan unsur objektif

adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan keadaan-keadaan

³⁸ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, halaman 8.

³⁹ Amir Ilyas, *Op.Cit.*, halaman 25.

⁴⁰ *Ibid*, halaman 25

dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur tersebut diantaranya :

- a. Perbuatan
- b. Akibat
- c. keadaan-keadaan.

unsur-unsur tindak pidana adalah :⁴¹

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang oleh aturan hukum
- c. Ancaman pidana bagi yang melanggar larangan

Di dalam Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dalam buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 KUHP (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :

- a. Unsur tingkah laku

⁴¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1. Cet-6*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, halaman 79

- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif.